

BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. Simpulan Penelitian

Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pertama membahas seperti apa bentuk dan fungsi tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota dewan sebagai penutur pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tuturan kesantunan direktif adalah wujud dari tindak tutur direktif yang dilakukan oleh penutur secara santun dan itu terjadi didasari oleh suatu peristiwa atau konteks tertentu. Tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota dewan tersebut terjadi dalam bentuk lingual imperatif, deklaratif dan interogatif. Masing-masing bentuk lingual tuturan tersebut memiliki fungsi tuturan yang beragam dan mempunyai makna tuturan tertentu. Makna tuturan dalam pragmatik inilah yang menjadi ciri khas dalam kajian pragmatik, berbeda dengan kajian semantik. Pada tuturan direktif berbentuk deklaratif, fungsi tuturannya terdiri dari mengajak mitra tutur melakukan sesuatu, meminta mitra tutur melakukan sesuatu, meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu, menyarankan mitra tutur melakukan sesuatu, mempersilakan mitra tutur melakukan sesuatu dan mengusulkan mitra tutur melakukan sesuatu. Pada tuturan direktif dengan bentuk imperatif, fungsi tuturannya terdiri dari mengajak mitra tutur melakukan sesuatu, mengusulkan mitra tutur melakukan sesuatu, memerintah mitra tuturmelakukan sesuatu, memohon mitra tutur melakukan sesuatu, memerintah/meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu, dan memperingatkan untuk melakukan sesuatu. Dan pada tuturan direktif berbentuk interogatif, fungsi tuturannya terdiri dari meminta mitra tutur menjelaskan sesuatu, menyarankan mitra tutur melakukan sesuatu, mempersilakan mitra tutur melakukan sesuatu, memerintah/memerintah mitra tutur menjelaskan sesuatu, dan meminta mitra tutur menjawab singkat ya atau tidak.

Kesantunan suatu tuturan direktif pada penelitian ini dapat diidentifikasi dari bentuk lingual tuturan, penanda lingual tuturan, dan intonasi tuturan/prosodi. Merujuk pada skala ketidklangsungan tuturan dari Leech, dapat diasumsikan bahwa tuturan direktif berbentuk interogatif merepresentasikan tuturan yang paling santun dibandingkan dengan tuturan direktif berbentuk deklaratif dan imperatif. Atas dasar

commit to user

pertimbangan ini, maka setiap tuturan direktif dari anggota dewan yang berbentuk interogatif dikategorikan memiliki derajat *santun*; yang berbentuk deklaratif memiliki derajat *cukup santun*; dan yang berbentuk imperatif memiliki derajat *kurang santun*.

Penanda lingual kesantunan suatu tuturan ditunjukkan oleh para penutur dengan menggunakan tuturan-tuturan tertentu yang menjadi unsur atau bagian dari tuturan direktif. Tuturan-tuturan yang dimaksud memiliki fungsi sebagai pembentuk suatu tuturan direktif yang dianggap santun atau sebagai penanda kesantunan tuturan direktif. Sebagai contohnya penggunaan tuturan pronomina 'kita' yang menggantikan pronomina 'saya' ketika penutur meminta mitra tutur melakukan sesuatu, seperti tuturan '*Perlu kita ketemu karena ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, kalau klir ya sudah*' yang dilakukan oleh penutur-legislator 4. Penggunaan tuturan 'kita' pada tuturan tersebut mempunyai maksud atau makna yang menggambarkan kebersamaan atau kerukunan antara penutur dan mitra tutur. Berbeda bila tuturan 'kita' diganti dengan tuturan 'saya', tuturan 'saya' mengandung makna yang kurang/tidak menunjukkan kebersamaan. Penggunaan tuturan 'kita' dalam tuturan direktif tersebut merupakan realisasi perilaku santun berbahasa yang dilandasi oleh nilai-nilai kultural Jawa yang melekat pada diri penutur yaitu nilai *kerukunan, kebersamaan, atau kegotongroyongan*. Nilai kultural tersebut menjadi prinsip kerukunan dalam berinteraksi satu sama lain bagi masyarakat Jawa khususnya. Prinsip kerukunan tersebut memiliki empat unsur nilai/maksim: *kurmat, andhap asor, empan papan, dan tepa slira*.

Penanda lingual kesantunan direktif pada penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yang merujuk pada kaidah kesantunan dari Lakoff. Pertama, kaidah kesantunan *don't impose* 'jangan memaksa', ini direpresentasikan dengan penggunaan tuturan verba seperti **usul/mengusulkan**, dan **perlu**; penggunaantuturan tanya **apa/apakah, berapa, dan bagaimana**; dan penggunaan tuturan intonasi tanya / tanpa kata tanya. Kedua, kaidah kesantunan *give options* 'memberi pilihan', ini direpresentasikan dengan penggunaan tuturan seperti: **sudah?**, **cukup?**, dan **ada lagi?**, dan ... **atau ...?** dengan intonasi tanya. Dan yang ketiga, kaidah kesantunan *make the others feel happy*, 'buat mitra tutur merasa baik/tidak terganggu secara psikologis', ini direpresentasikan dengan penggunaan tuturan pronomina **kita** dan **kami**, tuturan verba **tolong, mohon, silakan, dan** tuturan sapaan atau panggilan **pak/pak kepala, mas, panjenengan, dan pimpinan**.

Untuk penggunaan intonasi perlu ditambahkan bahwa aspek intonasi turut mempengaruhi kesan kepada mitra tutur atas tuturan direktif yang dilakukan oleh penutur. Penutur akan dikatakan santun ketika ia mampu mengontrol perasaan atau emosi yang ada pada dirinya ketika berinteraksi dengan mitra tutur. Artikulasi yang jelas akan membuat interaksi berjalan dengan lancar. Begitu juga nada tuturan harus sesuai dengan situasi tuturan, topik pertuturan, latar belakang mitra tutur, dan jarak interaksi. Secara umum diakui oleh para pengguna bahasa bahwa bila penutur bertutur dengan nada lembut/rendah kepada mitra tutur yang berada pada jarak yang dekat dengannya maka ia akan dikatakan penutur yang santun. Sebaliknya bila penutur yang berbicara dengan nada keras/tinggi padahal mitra tuturnya berada pada jarak yang dekat akan memberikan kesan bahwa penutur tidak dapat berbicara dengan santun. Intonasi atau nada suatu tuturan menunjukkan gambaran suasana hati penuturnya.

Permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh aspek kekuasaan politik dan jarak sosial pada tuturan kesantunan direktif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah institusi pemerintahan bidang legislatif di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi yang salah satu fungsinya adalah mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan bidang eksekutif. Anggota DPRD berasal dari berbagai partai politik yang memiliki latar belakang historis maupun ideologi yang beragam pula. Latar belakang ini, langsung atau tidak langsung, mempengaruhi penggunaan bahasa para anggota dewan ketika mereka melakukan interaksi dengan mitra tutur eksekutif maupun dengan sesama anggota dewan. Meskipun secara pemerintahan hubungan kerja antara anggota dewan/anggota legislatif dengan personil/pejabat eksekutif adalah sejajar, namun karena fungsi lembaga legislatif (DPR/DPRD) adalah mengontrol lembaga eksekutif maka secara psikologis lembaga legislatif merasa lebih memiliki *power* untuk mengatur, menekan, bahkan memaksapihak eksekutif untuk mengikuti harapan dan kehendak lembaga legislatif. Sebagai akibatnya ini memunculkan penggunaan bahasa yang bersifat transaksional antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif. Penggunaan bahasa yang transaksional ini menjadi indikator adanya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun atas dasar kepentingan politik. Disinilah kontribusi pragmatik bagi masyarakat bisa dilihat dan dirasakan.

Indikasi pengaruh kekuasaan politik pada tuturan kesantunan direktif ini juga dijumpai dalam penelitian ini, seperti pada tuturan yang dilakukan oleh penutur legislator 1 berikut: *(102) Yang ditanyakan itu anggaran yang 2011 itu sudah dianggarkan dan sudah dilaksanakan, posisi anggarannya seperti apa?* *(103) Jelaskan secara detil yang 2011 itu.* Kedua tuturan direktif ini, tuturan (102) berbentuk interogatif sementara tuturan tuturan (103) berbentuk imperatif. Tuturan direktif berbentuk imperatif jelas lebih memiliki tekanan psikologis yang lebih besar daripada yang berbentuk interogatif. Ini bisa dilakukan oleh legislator 1 sebagai penutur karena yang bersangkutan adalah pemimpin rapat yang berasal dari partai politik (partai Golkar) yang kader partainya tidak sedang menjadi kepala daerah (bupati/walikota)_bupati/walikota adalah pucuk pimpinan lembaga eksekutif. Ada kemungkinan tuturan direktif (102) dan (103) tidak akan terjadi dalam interaksi antara penutur legislator 1 dengan perwakilan dari mitra tutur eksekutif bila yang menjadi kepala daerah adalah berasal dari partai asal penutur legislator 1.

Akibat lebih jauh dari situasi yang semacam itu adalah bisa memunculkan politik transaksional antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif, baik yang bersifat personal maupun institusional/kelompok. Konsekuensinya, penggunaan bahasa yang digunakan oleh penutur, dalam hal ini pilihan tuturannya/diksinya, mengandung maksud transaksional pula. Sebagaimana tuturan kesantunan direktif yang ditemukan dalam penelitian ini, misalnya tuturan yang dilakukan oleh legislator 1 yaitu *(118) Mas DPU, tolong setelah ini panjenengan ketemu kami;* tuturan-tuturan direktif dari legislator 4 yaitu *(145) Ini berkaitan dengan pasar Ir.Sukarno, disini saya usulkan untuk koordinasi* dan *(150) Perlu kita ketemu karena ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, kalau klir ya sudah.* Penggunaan tuturan ‘*tolong setelah ini panjenengan ketemu kami*’, ‘*saya usulkan untuk koordinasi*’ dan ‘*Perlu kita ketemu*’ pada tuturan kesantunan direktif tersebut, membuka peluang munculnya peristiwa transaksional atau politik transaksional antara penutur / pihak legislatif dengan pihak mitra tutur/ pihak eksekutif. Dengan gambaran ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan tuturan verba tertentu dalam suatu tuturan direktif bisa dijadikan pintu masuk untuk mengenali atau mengetahui suatu peristiwa sosial di luar masalah kebahasaan, misalnya praktek korupsi, penyimpangan kekuasaan, konspirasi politik, dan lain-lain.

Permasalahan ketiga dalam penelitian ini adalah tentang strategi tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kesantunan berbahasa yang dijadikan sebagai rujukan adalah kesantunan dari Lakoff yang disebut *rule of politeness* 'kaidah kesantunan_ *don't impose, give options, dan make the others feel good*. Kaidah kesantunan ini berperan sebagai payung bagi strategi kesantunan yang digunakan oleh penutur. Dan strategi tuturan kesantunan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah strategi bertutur yang digagas oleh Brown dan Levinson yang meliputi strategi: *on record*, kesantunan positif, kesantunan negatif, *off-record*, dan diam/tidak melakukan FTA. Dari lima strategi tersebut, ada empat strategi yang digunakan oleh penutur dalam penelitian ini yaitu strategi *on-record*, kesantunan positif, kesantunan negatif, dan *off record*. Pada strategi kesantunan positif terdapat dua tipe strategi yang digunakan oleh penutur yaitu strategi melibatkan penutur dan mitra tutur ke dalam suatu aktivitas dan strategi memberi alasan. Strategi melibatkan penutur dan mitra tutur ke dalam suatu aktivitas diisitilahkan penulis sebagai strategi membangun kebersamaan penutur dengan mitra tutur. Pada strategi kesantunan negatif terdapat empat strategi yaitu strategi bertanya/berpagar, strategi impersonal, strategi mitigasi tekanan, dan strategi honorifik/penghormatan. Dengan memperhatikan bentuk dan fungsi tuturan serta penanda lingual yang ada dalam setiap tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh penutur, maka tuturan kesantunan direktif tersebut bisa menggambarkan penggunaan strategi kesantunan direktif yang lebih dari satu jenis. Penggunaan strategi kesantunan direktif yang lebih dari satu jenis tersebut bisa berupa, misalnya, kombinasi penggunaan strategi *on-record* dengan strategi kesantunan positif memberi alasan (dua strategi), strategi kesantunan negatif impersonal dengan strategi mitigasi tekanan dan strategi kesantunan positif melibatkan mitra tutur ke dalam aktivitas penutur, dan lain-lain.

Penggunaan strategi tuturan kesantunan direktif dari anggota dewan dipengaruhi oleh aspek sosial yang menjadi latar belakangnya. Aspek sosial yang dirujuk adalah tiga aspek sosial dari Brown dan Levinson yaitu *relative power* 'kekuasaan relatif', *social distance* 'jarak sosial', dan *degree of imposition* 'derajat imposisi'. Pada penelitian ini aspek sosial kekuasaan relatif dan jarak sosial yang digunakan sebagai variabel penelitian. Aspek kekuasaan relatif yang dimaksud adalah kekuasaan politik yang dimiliki oleh anggota dewan. Dan aspek jarak sosial berkaitan hubungan kedekatan

antara penutur sebagai anggota legislatif dengan mitra tutur sebagai pihak eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Meskipun aspek derajat tekanan tidak difungsikan sebagai variabel penelitian, namun dalam realisasi pertuturan direktif derajat tekanannya tetap bisa dirasakan, tetap muncul keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa konsep Brown dan Levinson tentang faktor *sosial relative power* (P) atau kekuasaan politik, *social distance* (D) atau jarak sosial, dan *degree of imposition* (I) atau tingkat imposisi selaras dengan fakta penelitian ini.

Aspek kekuasaan politik menunjukkan faktor sosial yang paling besar yang memberi pengaruh bagi penutur melakukan tindak tutur direktif secara santun. Pernyataan ini didasari oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa dalam peristiwa interaksi atau komunikasi ketika rapat DPRD berlangsung, penutur yang mempunyai jabatan struktural yang lebih tinggi cenderung lebih dominan dalam melakukan tindak tutur direktif dibandingkan dengan penutur lain yang tidak memiliki jabatan struktural. Pada penelitian ini ditunjukkan oleh penutur legislator 1 dan legislator 4. Penutur legislator 1 dan legislator 4 selain sebagai ketua/pemimpin rapat juga mempunyai jabatan struktural sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dengan latar belakang sosial seperti ini maka seorang penutur, dalam hal ini legislator 1 atau 4, sangat kuasa untuk mendominasi pertuturan.

Dalam hal jenis strategi kesantunan yang digunakan oleh para penutur, secara keseluruhan strategi memitigasi tekanan menunjukkan kecenderungan penggunaan yang paling tinggi frekuensinya. Strategi mitigasi tekanan merupakan bagian dari strategi kesantunan negatif, dengan memitigasi tekanan suatu perintah atau permintaan maka tuturan menjadi santun sehingga mitra tutur tidak terasa terancam mukanya demikian pula bagi penutur merasa tidak mengancam muka mitra. Dengan demikian mitra tutur merasa nyaman atau tidak terganggu. Tuturan-tuturan yang menjadi penanda lingual strategi memitigasi tekanan adalah *tolong*, *mohon*, *silakan*, *mangga* (kode lingual jawa), *usul*, dan *perlu*. Sebagai bagian dari strategi kesantunan negatif maka maksud penggunaan strategi ini adalah kehendak penutur terhadap mitra tutur agar terhindar dari tekanan atau ancaman. Selain itu juga menunjukkan perilaku hormat penutur kepada mitra tutur. Bila mitra tutur merasa tidak tertekan dan dihormati maka mitra tutur kemungkinan besar memenuhi permintaan atau perintah dari penutur untuk melakukan sesuatu_ tindak perlokusi. Secara keseluruhan strategi tuturan yang paling dominan

digunakan oleh para legislator adalah strategi kesantunan negatif. Ini dikarenakan ada empat jenis strategi kesantunan negatif yang digunakan oleh penutur yaitu strategi bertanya/ tuturan berpagar, strategi impersonal, strategi mitigasi tekanan, dan strategi honorifik. Dari empat strategi kesantunan negatif ini, strategi mitigasi tekanan menunjukkan penggunaan yang dominan. Sebagai bagian dari strategi kesantunan negatif, penggunaan keempat strategi kesantunan negatif tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan gagasan tanpa ada tekanan atau gangguan bagi mitra tutur maupun penutur. Dengan meminta atau memerintah mitra tutur melakukan sesuatu tutur merasa tertekan atau terancam mukanya, maka mitra tutur kemungkinan besar bersedia memenuhi permintaan dari penutur untuk melakukan sesuatu dan itu sekaligus menunjukkan perilaku santun berbahasa dari penutur.

Penggunaan strategi tuturan yang direalisasikan oleh anggota dewan pada penelitian ini menunjukkan pematuhan pada kaidah kesantunan dari Lakoff yaitu *don't impose* 'jangan memaksa', *give options* 'beri pilihan', dan *make the others feel happy* 'buat orang lain/mitra tutur merasa baik/tidak terganggu'. Pada kaidah ***jangan memaksa*** terdapat tiga strategi kesantunan negatif yaitu strategi bertanya dengan menggunakan tuturan tanya ***apa***, ***berapa***, dan ***bagaimana***; strategi bertanya dengan intonasi tanya yang berfungsi meminta/memerintah mitra tutur menjelaskan sesuatu; dan strategi tuturan berpagar dengan menggunakan tuturan moda ***mungkin***.

Pada kaidah ***beri pilihan*** terdapat dua strategi kesantunan negatif yaitu strategi bertanya dengan intonasi tanya dan strategi tuturan verba ***terserah***. Penggunaan intonasi tanya untuk perealisasi kaidah *beri pilihan* berupa tuturan adverbial ***sudah?*** dan tuturan adjektiva ***cukup?***.

Dan pada kaidah ***buat orang lain/mitra tutur merasa baik atau tidak terganggu*** terdapat empat strategi yaitu strategi bertutur *on record*, strategi kesantunan negatif, strategi kesantunan positif, dan strategi *off-record*. Strategi *on-record* digunakan oleh penutur untuk melakukan tindak tutur mengajak, menggunakan tuturan verba ***mari/marilah***; untuk melakukan tindak memerintah dengan menggunakan tuturan verba seperti ***jelaskan***, ***harus ada tindak lanjut***, ***usulkan***, dan ***perlu kita ketemu***; dan untuk melakukan tindak memperingatkan dengan menggunakan tuturan frasa verba ***jangan sampai***. Strategi kesantunan negatif untuk kaidah ini terdapat tiga strategi yaitu strategi impersonal, menuturkan sebutan nama institusi atau jabatan/kedudukan sosial mitra

tutur seperti, *Sekda, Kepala BKD, DPU*, atau *pimpinan*; strategi honorifik yaitu menggunakan tuturan sapaan untuk menunjukkan memberi hormat epada mitra tutur seperti: *mas dan pak*; dan strategi memitigasi tekanan dengan menggunakan tuturan verba seperti: *tolong, mohon, silakan, usul*, dan *perlu*. Strategi kesantunan positif yang digunakan oleh penutur sebagai realisasi dari kaidah *buat mitra tutur merasa baik* pada penelitian ini ada dua jenis yaitu strategi membangun kebersamaan antara penutur dan mitra tutur dalam satu aktivitas, menggunakan tuturan pronomina *kita*, dan strategi memberi alasan, menggunakan tuturan konjungsi *agar, karena, supaya, kalau*, atau *apabila*. Dan strategi *off record* ‘tak langsung’ dilakukan oleh penutur dengan menggunakan tuturan frasa nomina penanda kelompok penutur/legislator – *pimpinan yang lain juga*.

Strategi kesantunan negatif yang dilakukan oleh para penutur pada penelitian ini menunjukkan pematuhan pada ketiga kaidah kesantunan berbahasa dari Lakoff *don't impose, give options*, dan *make the others feel happy*. Sedangkan, strategi *on record*, strategi kesantunan positif, dan strategi *off record* hanya menunjukkan pematuhan pada kaidah kesantunan *make the others feel happy*. Kaidah kesantunan *make the others feel happy*, pada penelitian ini, paling cenderung dipatuhi oleh para penutur dengan tingkat prosentase pematuhan 68.97%, kaidah kesantunan *don't impose* tingkat prosentase pematuhannya 22.41%, dan kaidah *give options* tingkat prosentase pematuhannya paling rendah 8.62%. Gambaran ini, menunjukkan keselarasan pandangan dengan prinsip kerukunan Gunarwan (2007e), utamanya prinsip *kurmat* ‘hormat’ dan *andhap asor* ‘rendah hati’. Untuk membuat mitra tutur merasa senang dan tidak terganggu, diantaranya menggunakan tuturan-tuturan penghormatan/honorifik misalnya dengan tuturan sebutan *pak/bapak, bu/ibu mas* atau *mbak* dalam budaya Jawa khususnya. Selain itu, dengan menggunakan tuturan yang menunjukkan sikap rendah hati dan dituturkan dengan intonasi yang lembut misalnya tuturan *maaf* atau *baik*. Dengan melakukan tuturan-tuturan yang semacam maka mitra tutur bisa merasa senang karena mukanya terjaga, demikian juga muka penutur.

Temuan-temuan penelitian yang tersebut di atas menunjukkan temuan tema budaya yang ada dalam penelitian ini. Tema budaya tersebut, pertama, dengan kekuasaan politiknya, legislator kuasa memberi tekanan direktif kepada mitra tutur untuk melakukan atau menjelaskan sesuatu, lebih-lebih bila direalisasikan dalam bentuk

imperatif. Tuturan direktif berfrasa verba dengan bentuk imperatif seperti *harus ada tindak lanjut, perlu ketemu, perlu koordinasi* atau *jangan sampai* memunculkan interpretasi makna tertentu yang bisa berfungsi sebagai penanda untuk mengenali atau mengetahui lebih jauh suatu peristiwa sosial tertentu. Berangkat dari pandangan ini, dapat dirumuskan bahwa penggunaan bahasa melalui tuturan direktif bisa menjadi pembuka jalan/pintu masuk untuk mengetahui lebih mendalam mengapa suatu masalah sosial-budaya bisa terjadi di masyarakat misalnya masalah praktek korupsi, pelanggaran hukum, penyimpangan kekuasaan dan lain-lain. Kedua, pilihan strategi yang digunakan oleh legislator/penutur dalam bertindak tutur direktif menentukan kaidah kesantunan yang diikuti, dan ini dipengaruhi oleh aspek kekuasaan politik dan jarak sosial. Dan ketiga, tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh para anggota dewan ketika rapat badan anggaran dipengaruhi oleh aspek kekuatan politik dan jarak sosial yang menghasilkan pola tuturan tertentu. Pola tuturan tersebut terdesain dari bentuk struktural tuturan (imperatif, deklaratif, atau interogatif), jenis strategidan sub-strategi tuturan yang dilandasi oleh aspek kekuasaan politik yang menunjukkan realisasi kaidah kesantunan berbahasa dari Lakoff. Terdapat empat pola tuturan kesantunan direktif yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu (1) Pola tuturan kesantunan direktif-Imperatif beraspek kekuasaan politik sebagai realisasi kaidah kesantunan *make the others feel good* (Gambar 4.3), (2) Pola tuturan kesantunan direktif-interogatif beraspek jarak sosial sebagai realisasi kaidah kesantunan *Don't Impose* (Gambar: 4.4), (3) Pola tuturan kesantunan direktif-interogatif dan direktif-deklaratif beraspek jarak sosial sebagai realisasi kaidah kesantunan *give options* (Gambar 4.5), dan (4) Pola tuturan kesantunan direktif-deklaratif beraspek jarak sosial sebagai realisasi kaidah kesantunan *make the others feel good* (Gambar 4.6).

B. Implikasi Penelitian

Dari penelitian ini dapat diperoleh implikasi yang bersifat teoritis maupun praktis. Implikasi teoritis dari temuan penelitian ini adalah:

1. Perluasan pemahaman bahwa tuturan kesantunan direktif atau bertindak tutur direktif secara santun terjadi sebagai bentuk pematuhan pada kaidah kesantunan berbahasa. Dalam penelitian ini kaidah kesantunan yang dijadikan rujukan adalah kaidah kesantunan dari Lakoff (*don't impose, give options, dan make the others feel*

good). Tuturan kesantunan direktif bisa terjadi dalam bentuk deklaratif, imperatif, maupun imperatif. Masing-masing bentuk lingual kesantunan tersebut memiliki fungsi direktif yang berbeda-beda dan mengandung makna atau maksud tuturan yang berbeda pula yang terikat dengan konteks pertuturan. Bentuk lingual tuturan kesantunan direktif bisa mengilustrasikan dua hal yaitu langsung dan tidaklangsungan tuturan dan tingkat kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh penutur. Bentuk interogatif tuturan direktif mengilustrasikan permintaan atau perintah melakukan sesuatu secara tidak langsung dan santun. Bentuk deklaratif tuturan direktif mengilustrasikan perintah atau permintaan melakukan sesuatu secara semi-tidak langsung dan cukup santun. Dan bentuk imperatif tuturan direktif mengilustrasikan perintah atau permintaan melakukan sesuatu secara langsung dan dianggap kurang santun. Namun demikian kesantunan suatu tuturan tidak bisa ditentukan dari bentuk lingualnya semata, tetapi juga ditentukan oleh unsur intonasi tuturan, tinggi-rendah atau keras-lembutnya tuturan. Unsur penentu kesantunan yang lain adalah penanda lingual, yaitu penggunaan tuturan pronomina, verba, nomina, atau adjektiva tertentu. Dengan demikian unsurpenentu kesantunan berbahasaberupa bentuk lingual, penanda lingual, dan intonasi tuturan merupakan sumber daya kesantunan linguistik.

2. Aspek kekuasaan politik yang dimiliki oleh seorang penutur dan jarak sosial atau hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur berpengaruh pada realisasi kesantunan tindak tutur direktif yang dilakukan oleh penutur. Pengaruh tersebut terjadi pada pilihan tuturan, strategi tuturan dan intonasi tuturan yang digunakan. Kemudian atas pilihan tuturan, strategi tuturan dan intonasi tuturan yang digunakan tersebut, menimbulkan derajat tekanan suatu tuturan direktif, bisa kuat, sedang, atau ringan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial kekuasaan politik (*relative power*), jarak sosial (*social distance*) dan tingkat tekanan (*degree of imposition*) memiliki hubungan bersifat kausal. Itu dapat disimpulkan bahwa aspek tingkat tekanan merupakan 'akibat' dari suatu tuturan direktif dilakukan bukan merupakan 'sebab/penyebab'. Sebaliknya, aspek kekuasaan politik (*relative power*) dan hubungan kedekatan penutur dengan mitra tutur (*social distance*) merupakan faktor 'penyebab' munculnya tingkat tekanan (*degree of imposition*) tuturan direktif.

3. Pragmatik sebagai sebuah cabang ilmu linguistik yang berakar pada ilmu filsafat bahasa, bisa menjadi alat bantu ilmu lain misalnya ilmu hukum, psikologi, ataupun ilmu agama untuk mengetahui atau menganalisis maksud/makna penggunaan bahasa yang berkaitan dengan masalah hukum, psikologi atau agama.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini :

1. Praktek berbahasa secara santun oleh kelompok masyarakat tertentu yang secara kultural memiliki pengaruh sosial yang besar di masyarakat, seperti anggota legislatif, membantu membuat situasi sosial yang lebih positif dan damai, serta tidak menimbulkan kegaduhan publik, lebih-lebih di tengah maraknya ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat.
2. Pendorong bagi peneliti pragmatik mengungkap lebih dalam seluk beluk penggunaan tindak tutur yang lain yang dilakukan oleh seseorang dari sebuah kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh sosial yang signifikan di masyarakat.
3. Pengayaan pengetahuan penggunaan bahasa (pragmatik) bagi pembaca/masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara/strategi bertutur santun dengan mitra tutur atau mitra bicara pada suatu situasi tutur.
4. Keperluan pembelajaran penggunaan bahasa di kelas dengan mengajarkan pengetahuan tentang tindak tutur, strategi bertutur, makna tuturan/implikasi tuturan dan kesantunan bahasa
5. Pengajaran kesantunan dalam berbahasa di sekolah merupakan salah satu praktek pendidikan karakter bagi murid-murid yang hasilnya berguna bagi kehidupan masa depan bagi murid secara khusus dan bagi masyarakat secara luas

C. Saran Penelitian

Berdasarkan atas temuan dan pembahasan penelitian ini, berikut saran-saran dari penulis untuk pengembangan topik kajian tuturan kesantunan direktif:

1. Meneliti penggunaan tuturan kesantunan direktif oleh anggota legislatif pada peristiwa tutur lain seperti Rapat Komisi DPR/DPRD atau Rapat Badan Legislatif DPR/DPRD dengan menggunakan variabel gender, usia, asal partai politik atau latar belakang pendidikan.
2. Meneliti tuturan kesantunan berbahasa dalam wacana akademik pada peristiwa rapat di lembaga pendidikan misalnya antara rektor dengan dosen dan tenaga

kependidikan/staf administrasi atau kepala sekolah dengan para guru dan staf administrasi pendidikan.

3. Meneliti tuturan kesantunan/ketidaksantunan dalam wacana bisnis pada peristiwa rapat di perusahaan pemerintah (BUMN) atau perusahaan swasta nasional antara jajaran direksi dengan karyawan.

